

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN FAKTOR-  
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 2008-2012**

**JURNAL PUBLIKASI**



Oleh :

**Nama : Muhammad Yudha Pangaribowo**

**Nomor Mahasiswa : 09313003**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2015**

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN FAKTOR-  
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 2008-2012**

**Muhammad Yudha Pangaribowo**

**Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia**

*Abstraksi*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perhitungan indeks gini dan analisis regresi data panel dengan menggunakan regresi *fixed effect*. Hasil analisis dari ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui bahwa ketimpangan pendidikan yang ada di D.I. Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah dengan kisaran angka gini 0,2-0,35. Selama tahun 2008-2012 sempat terjadi pergeseran ketimpangan tertinggi dari Kabupaten Bantul ke Kabupeten Kulon Progo. Kemudian analisis hasil yang dilakukan dengan regresi data panel diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel ketimpangan pendidikan, kemudaian variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ketimpangan pendidikan. Sedangkan Variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi variabel Ketimpangan pendidikan.

Kata Kunci : Ketimpangan pendidikan, Gini Pendidikan, Data Panel.

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi, yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga meliputi persoalan distribusi pendapatan dan sosial masyarakat. Keadaan distribusi pendapatan dan sosial suatu masyarakat akan mencerminkan bagaimana kualitas pembangunan manusia di dalam sebuah negara. Kualitas pembangunan manusia diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Ukuran tersebut menyertakan beberapa variabel penting, yang tidak hanya berkaitan dengan variabel ekonomi semata, tetapi juga menyangkut pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan, bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting untuk pembangunan ekonomi. Pendidikan yang baik akan berdampak baik juga pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa negara yang masyarakatnya memiliki kesempatan menempuh pendidikan dan memiliki distribusi pendidikan yang baik, ternyata berdampak positif terhadap pembangunan ekonominya. Dengan demikian, pembangunan pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar secara menyeluruh.

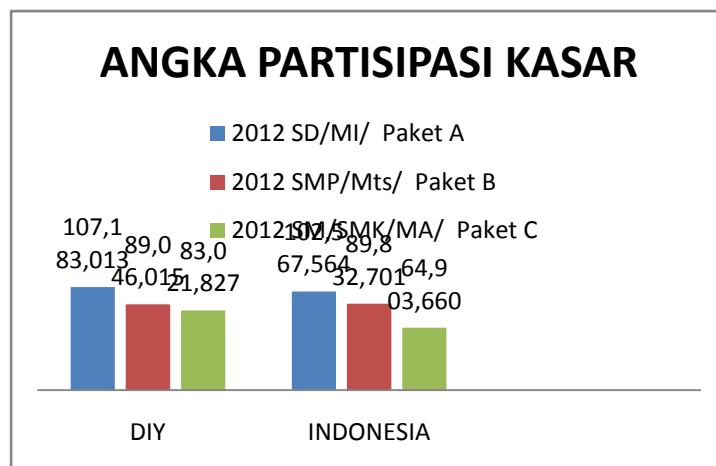
Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Disatu pihak, untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaatnya. Individu yang memperoleh pemasukan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Yogyakarta, sebagai salah satu kota di Indonesia yang mendapat sebutan sebagai kota pelajar, dapat dilihat bagaimana capaian pemerataan jenjang pendidikan. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa APK untuk jenjang pendidikan

SMP dan sederajat adalah 89% namun pada APK untuk jenjang pendidikan SMA dan sederajat adalah 83%. Ini berarti adanya penurunan partisipasi sekolah dari SMP ke SMA sebesar 6% dan itu berarti pada tingkat sekolah SMP dan yang sederajat terdapat anak usia pendidikan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (lihat diagram 1.)

Diagram Data 1.

Angka partisipasi kasar jenjang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012



Sumber, BPS D.I Yogyakarta.

Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, pada tahun 2012, Gunung kidul merupakan kabupaten di Provinsi DIY yang memiliki rata-rata paling rendah dengan tahun lama sekolah sebesar 7,7 tahun selanjutnya diikuti oleh kabupaten Kulon Progo dengan tahun lama sekolah sebesar 8,95 tahun. Ini berarti untuk Gunung kidul untuk rata-rata penduduk yang bersekolah hanya pada jenjang SD dan tidak tamat SMP. Berarti untuk program belajar 9 tahun masih belum dapat terpenuhi di beberapa kabupaten walaupun secara rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan rata-rata 9,21 tahun (lihat tabel 1.)

Tabel 1.  
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta tahun 2010-2012

Kabupaten	Tahun		
	2010	2011	2012
Kulon Progo	8.20	8.37	8.37
Bantul	8.82	8.92	8.95
Gunung Kidul	7.65	7.70	7.70
Sleman	10.30	10.51	10.52
Kota Yogyakarta	11.48	11.52	11.56
D I Yogyakarta	9.07	9.20	9.21

Sumber, BPS berbagai Terbitan.

Dari tabel tersebut diatas, tampak adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah tersebut. Tabel 2. Menjelaskan bagaimana kondisi kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.  
Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TAHUN	KP	BTL	GK	SLM	YK
2008	26,85	18,54	25,96	12,34	10,81
2009	24,65	17,64	24,44	11,45	10,05
2010	23,2	16,09	22,05	10,7	9,75
2011	23,63	17,28	23,03	10,61	9,62
2012	23,32	16,97	22,72	10,44	9,38

Sumber BPS,berbagai edisi.

Tabel diatas menjelaskan tentang penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2012 berada pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 23,32% sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada pada Kota Yogyakarta.

Dari hal tersebut diatas, timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dijawab yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendidikan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah di dalam APBD terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketimpangan Pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Kajian Pustaka**

Muhammad Ja'far Bustomi (2002), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indeks gini pendidikan. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lain indeks gini pendidikan, angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, gender gap dan ketimpangan pendapatan (gini ratio). Dengan menggunakan data panel tahun 2007-2010, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan wilayah kabupaten selalu lebih tinggi daripada wilayah kota. Untuk faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan, gender gap, angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

Astuti Rahayu (2003), melakukan penelitian tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia tahun 1975-2000, dengan menggunakan data panel. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah rata-rata tahun sekolah, PDRB perkapita, gender gap sebagai variabel independennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di beberapa provinsi di

Indonesia telah menurun selama 25 tahun terakhir, kecuali provinsi Irian Jaya yang justru mengalami kenaikan ketimpangan pendidikan. Selain itu, juga ditemukan adanya pola yang nyata dengan hubungan variabel yang berkebalikan (negatif) antara ketimpangan pendidikan yang diukur dengan indeks gini pendidikan dan rata-rata sekolah. Hal ini mengimplikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pencapaian sekolah pendidikan yang tinggi, paling mungkin mencapai pemerataan pendidikan daripada provinsi dengan tingkat pencapaian pendidikan yang rendah.

Ekber Tomul (2009), menjelaskan hubungan antara ketimpangan pendidikan di Turki dengan rata-rata lama menempuh pendidikan (sekolah). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan pendidikan di Turki selama periode waktu tahun 1975-2000. Terdapat hubungan yang negatif antara rata-rata lama menempuh pendidikan dengan ketimpangan pendidikan yang diukur dengan indeks gini pendidikan dan terdapat hubungan yang positif antara peningkatan rata-rata lama menempuh pendidikan dengan ketimpangan pendidikan.

Salwa Trabelsi (2013), melakukan penelitian tentang hubungan antara rata-rata lama pendidikan (bersekolah) dengan ketimpangan pendidikan di Tunisia selama tahun 1975-2004. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan di seluruh wilayah di Tunisia semakin meningkat diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendidikan. Selain itu juga ditemukan bahwa ketimpangan pendidikan banyak terjadi di wilayah pedesaan daripada di wilayah perkotaan.

Lessons (2012), melakukan penelitian tentang ketimpangan pendidikan di wilayah Mena (Timur Tengah dan Afrika Utara). Sampel yang digunakan adalah 15 negara MENA selama periode 1950-2010 menggunakan data panel. Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendidikan peneliti menggunakan kurva Kuznets. Penelitian ini menghitung indeks gini pendidikan di 15 negara MENA menurut kriteria jenis kelamin, usia dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan yang eksplisit menurun untuk semua negara, baik untuk pria dan wanita dan untuk semua kelompok umur. Temuan juga telah menunjukkan bahwa distribusi pendidikan lebih tidak merata

di negara-negara berpenghasilan menengah daripada di negara-negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2010 sementara pada tahun 1970 mengalami tingkatan yang sama antara negara menengah dan negara yang berpenghasilan tinggi. Pada tahap kedua penelitian adalah melakukan pengukuran ketimpangan pendidikan dengan *kurva Kuznets*. Hasilnya menunjukkan bahwa *kurva Kuznets* tergantung pada variabel yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendidikan.

Thomas et al (2001) dengan menggunakan data 85 negara pada kurun waktu 1960-1990 mengukur ketimpangan dalam menciptakan pendidikan. metode yang digunakan ada 2 yaitu langsung dan tidak langsung untuk mengukur indeks gini berdasarkan rata-rata lama sekolah Yang menggambarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa selama tiga dekade ketimpangan mengalami penurunan. Ketimpangan dalam pendidikan yang digambarkan dengan AYS menunjukkan hubungan negatif. Implikasinya bahwa Negara dengan capaian pendidikan penduduknya yang tinggi lebih merata mengenyam pendidikan dibandingkan dengan Negara dengan capaian pendidikan penduduknya rendah. diperoleh *kurva Kuznets* jika digunakan standar deviasi pendidikan. Thomas et al (2001) juga menemukan bahwa kesenjangan gender berhubungan secara negatif terhadap ketimpangan pendidikan. peningkatan PDRB per kapita berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pendidikan dan berpengaruh positif terhadap AYS angkatan kerja suatu daerah.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan Sumber Data**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu prosedur atau cara yang disasari pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari atau mengetahui sesuatu untuk menjawab masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka yaitu dengan mencari data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber- sumber lainnya. Ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu,

1. Gini pendidikan ( Y )
2. Indeks pembangunan manusia ( X1 )
3. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ( X2 )
4. Ketimpangan pendapatan ( X3 )
5. Laju pertumbuhan ekonomi ( X4 )

#### **Alat Analisis Data**

Untuk mengukur ketimpangan pendidikan, maka kita perlu menghitung dengan rumus :

$$E_{GI} = \left(\frac{1}{\mu}\right) \sum_{i=2}^n \sum_{j=i}^{i=1} p_i (y_i - y_j) p_j$$

Dimana:

EGI = ketimpangan pendidikan

$\mu$  = rata-rata tahun pendidikan

$p_i - p_j$  = proporsi populasi tingkat pencapaian sekolah yang pasti

$y_i - y_j$  = tahun sekolah pada tingkat pencapaian yang berbeda

$n$  = jumlah kategori tingkat pencapaian sekolah

Average Years of Shooling (AYS)

$$\mu = AYS = \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan  $n = 6$  dengan kategori sebagai berikut: tidak sekolah/tidak tamat SD/MI, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/SMK, tamat Diploma I/II/III, tamat S1 dan S2.

Tabel 3.  
Kategori Tingkat Sekolah

Kategori tingkat sekolah	Tahun
Tidak sekolah/Tidak tamat SD	0+3=3
Tamat SD	6
Tamat SMP	9
Tamat SMA	12
Tamat D1,D2,D3	14
Tamat S1,S2	16

Sumber ,data diolah.

Berarti rumus untuk mencari ketimpangan pendidikan adalah:

$$E = \frac{1}{\mu} [p_2(y_2 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_1)p_1 + p_3(y_3 - y_2)p_2 + \dots + p_6(y_6 - y_1)p_1 + p_6(y_6 - y_2)p_2 + p_6(y_6 - y_3)p_3 + p_6(y_6 - y_4)p_4 + p_6(y_6 - y_5)p_5]$$

### Analisis Regresi Data Panel

Untuk menguji hipotesis yang ada, peneliti melakukannya dengan model regresi data panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 6*. Widarjono (2013) dalam bukunya mengatakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel.

Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode. Yaitu:

#### 1. *Common effect* model

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *ordinary least squares* (OLS).

2. *Fixed effect* model

Model ini mangasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intrsepe tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan *least squares dummy variables* (LSDV) dan ketika terdapat heteroskeditisitas menggunakan *fixed effect* dengan *cross section weight*.

3. *Random effect* model

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. namun demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel *random* atau *stokastik*.

## Hasil Dan Pembahasan

### Indeks Gini Pendidikan

Tabel 4  
Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon Progo	0,259587	0,232991	0,254911	0,248768	0,254453
Bantul	0,265943	0,244081	0,250211	0,246631	0,246176
Gunung Kidul	0,231842	0,227992	0,247684	0,247392	0,238774
Sleman	0,21877	0,210556	0,214098	0,199141	0,211086
Yogya	0,186522	0,172769	0,175029	0,169994	0,177406

Sumber: data diolah *excel*

Dari tabel gambar 4. diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah dimana hanya berkisar antara 0,2-0,35. Kota Yogya merupakan wilayah di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki tingkat ketimpangan pendidikan yang terkecil. Sedangkan untuk ketimpangan yang tertinggi selama 5 tahun dari tahun 2008-2012 adalah Kabupaten Bantul dengan angka 0,265943 yang terjadi pada tahun 2008. Akan tetapi terjadi pergeseran ketimpangan pendidikan tertinggi dari Kabupaten Bantul (2008-2009) ke Kabupaten Kulon Progo (2010-2012). Pada tahun 2012 pemerataan pendidikan yang terbaik tetap

berada di kota Yogyakarta dengan ketimpangan pendidikan mendekati pemerataan sempurna yaitu 0,177406, diikuti dengan Kabupaten Sleman (0,211086), Gunung Kidul (0,238774), Bantul (0,246176), Kulon Progo (0,254453).

### Hasil Regresi Data Panel

Tabel 5.  
Tabel pengujian hipotesis

Variabel	t-statistik	t-hitung	Prob.	Keterangan
C	-2.201323	1.645	0.0427	Signifikan
LOG X1	2.188490	1.645	0.0438	Signifikan
LOG X2	-3.758864	1.645	0.0017	Signifikan
LOG X3	2.978880	1.645	0.0089	Signifikan
LOG X4	0.638478	1.645	0.5322	Tidak Signifikan

### Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Artinya apabila nilai angka dari Indeks Pembangunan Manusia naik maka akan diikuti oleh kenaikan dari angka ketimpangan pendidikan. Ini berarti angka Variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik, tidak bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purchasing power parity index (PPP). Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan. Dengan ini IPM yang tinggi belum tentu dapat mengurangi angka ketimpangan

pendidikan. Pada saat masyarakat memilih untuk sejahterakan keluarga maka pilihan yang diambil adalah dengan melakukan sebuah pekerjaan, dan bukan untuk bersekolah. Bila kita mengacu pada data yang ada dalam BPS, angka partisipasi sekolah umur 16-18 adalah 80,22% sedangkan umur 19-24 adalah 44,32%. Dapat dikatakan minat untuk melanjutkan pendidikan pada fase SMA ke Universitas mengalami penurunan sebesar 35,9% di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Kemudian bila kita mengamati data BPS tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja tahun 2012 sebesar 413.274 jenis kelamin laki-laki merupakan angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA dan sebesar 248.411 jenis kelamin perempuan yang merupakan angkatan kerja. Ini berarti walaupun IPM mempengaruhi ketimpangan pendidikan, bukan berarti tingginya angka IPM dapat menurunkan angka ketimpangan pendidikan karena orang lebih memilih bekerja untuk mensejahterakan hidup daripada melanjutkan pendidikan.

### **Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti apabila ada kenaikan biaya untuk pendidikan akan menurunkan angka ketimpangan pendidikan. Menurut Mahmudi (2007), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu: rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Tingginya angka ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti kemiskinan, keluarga, pengangguran dll. Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia, pendistribusi dan penstabilisasi tentang segala kebijakan mengenai pendidikan. Penyediaan dana untuk pembangunan pendidikan seperti biaya beasiswa, Biaya Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung sekolah dan penyediaan tenaga pengajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa efektif dapat mengurangi ketimpangan pendidikan. Dengan kata lain, semakin besar nilai rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan dapat mempengaruhi untuk menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

### **Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Pendidikan**

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan ketimpangan pendidikan memiliki hubungan yang positif. Ini berarti apabila angka ketimpangan distribusi pendapatan naik maka akan diikuti dengan kenaikan angka ketimpangan pendidikan. Hasil ini tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh M.J. Bustomi Di Provinsi Jawa Tengah Yang mengatakan ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi dari ketimpangan pendidikan. Realita Di Provinsi D.I. Yogyakarta bahwa apabila pendapatan masyarakat merata maka akan memperkecil angka ketimpangan pendidikan. Semakin kecil angka ketimpangan pendapatan berarti semakin banyak orang yang berpenghasilan sama. Itu berarti banyak anak yang dapat bersekolah dan dengan kata lain ketimpangan pendidikan pun akan menurun.

### **Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Ketimpangan Pendidikan**

Hasil penelitian mengatakan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi dari ketimpangan pendidikan. Hal ini terjadi karena PDRB hanya melihat dari hasil produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah tersebut. Yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah PDRB mengalami peningkatan bukan dari baiknya kualitas pendidikan manusianya, namun dikarenakan banyaknya yang melakukan pekerjaan pada usia sekolah. Selain itu, banyaknya klaster seperti kasongan (gerabah), Manding (kulit) meningkatkan PDRB dengan produksi keajinan. Tidak mempengaruhinya laju pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendidikan di Yogyakarta juga dipengaruhi banyaknya sekolah informal yang mengajarkan kreatifitas masyarakatnya dengan seni dan budaya yang masih hingga saat ini melekat pada Yogyakarta. Dengan ini meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ketimpangan pendidikan Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah, yaitu dalam kisaran 0,20-0,35. Meskipun pada Kota Yogya pemerataan hampir menyeluruh pada tahun 2012 dengan angka 0,177406, diikuti dengan Kabupaten Sleman (0,211086), Gunung Kidul (0,238774), Bantul (0,246176), Kulon Progo (0,254453). Dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun tergolong ketimpangan rendah, namun Kulon Progo lah yang memiliki angka ketimpangan pendidikan yang tertinggi.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan Pendidikan. Ini terjadi karena dalam IPM merupakan hasil perhitungan dari indikator kesehatan yang diwakili dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tahun sekolah dan kemampuan masyarakat yang diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang masing-masing akan mempengaruhi dari besarnya nilai IPM tersebut. Selain itu, IPM juga untuk mengukur seberapa jauh pembangunan manusia untuk kesejahteraan manusia tersebut. Bila melihat paradigma sosial masyarakat yang dihantui oleh kemiskinan, pengangguran, mencari pekerjaan merupakan realita yang ada pada masyarakat Indonesia. Ini yang menyebabkan walaupun angka IPM mempengaruhi ketimpangan pendidikan tapi tidak selamanya angka IPM yang tinggi akan menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

Variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendidikan. Berarti naiknya biaya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan menurunkan ketimpangan pendidikan. kemiskinan, dan orang tua yang menganggur akan menyebabkan ketimpangan pendidikan tinggi. Ini yang menjadi alasan mengapa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sangat mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Bantuan seperti beasiswa, BOS,

pembangunan sarana pendidikan, penambahan tenaga pengajar, peningkatan mutu pengajar sangat efektif untuk menurunkan angka ketimpangan pendidikan.

Variabel ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan. Ini menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan dapat sangat mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Dari hasil penelitian bahwa apabila angka ketimpangan pendapatan tinggi akan mempengaruhi naiknya angka ketimpangan pendidikan.

Variabel laju pertumbuhan PDRB tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan. Ini berarti laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mempengaruhi angka dari ketimpangan pendidikan. Ini terjadi karena laju pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari besarnya angka produktifitas ekonomi suatu wilayah dengan melihat tingkat konsumsi, investasi, produksi barang dan jasa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil temuan empiris yang didapat dari penelitian ini, maka saran yang perlu disampaikan yaitu:

Untuk melakukan pemerataan pembangunan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebaiknya pemerintah lebih melihat pada angka ketimpangan pendidikan agar lebih tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan tentang pendidikan.

Pembangunan ekonomi sebaiknya jangan melupakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Karena yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa indeks pembangunan manusia tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah pembangunan manusia telah merata. Masih adanya pandangan masyarakat tentang “mending kerja dari pada sekolah” serta masih adanya pernikahan dimasa usia sekolah merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang masih harus dicari solusinya. Kemudian belanja pemerintah untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan harus lebih ditingkatkan dan harus tepat sasaran agar segala bantuan benar-benar tersalur kepada masyarakat yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *D.I. Yogyakarta dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Bantul dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Yogya dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Gunung Kidul dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Sleman dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Kulon Progo dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Kulon Progo* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Survei Sosial dan Ekonomi Nasional* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Gini Ratio* beberapa terbitan. BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.
- Bustomi. M. J. 2012. Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah.*Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Semarang (dipublikasikan).
- Digdowniseiso, Kumba, 2010, "Measuring gini coefficient of education: the Indonesian cases," MRPA paper, No. 19865. (<http://mprpa.ub.uni-munchen.de/19865>)
- Easterly, W. (2004), *The Elusive Quest for Growth, Economist's Adventures and Misadventures in the Tropics*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Galor, O. and Moav, O. (2004), "From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and The Process of Development," *Review of Economic Studies*, 60: 35-52.

- Hojo, Masakazu, 2009, "Inequality in Japanese Education: Estimating Using the Gini Education Coefficient," *The Japanese Economy*, vol. 36, no.3, pp: 3-27
- Kuncoro.M., 2004.*Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*.Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro.M., 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.Yogyakarta.
- Masyithah., 2011. "Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008".*Tesis-S2*, Sekolah Pascasarjana UGM.Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Mesa, E.P., 2007, "Measuring Education Inequality in the Philippines," *Theses*, University of the Philippines School of Economics, (<http://www.econ.upd.edu.ph/>)
- Pemerintah Republik Indonesia.1999, *Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia.2003, *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia.2004, *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Rahayu.A., 2003."Ketimpangan Pendidikan Di Indonesia".*Tesis-S2*, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Salwa Trabelsi (2013), Regional Inequality of Education in Tunisia: an Evaluation by the Gini Index , *JEL Classification: i22, i31, d63, c43*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Thomas, V., Y Wang and X. Fan, 2001, "Measuring Education Inequality: Gini Coefficient of Education," *Policy Research Working Paper*, No:2525, World Bank Institute.
- Todaro. M., dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.

- Tomul, Ekber (2009), Measuring regional inequality of education in Turkey: an evaluation by Gini index , *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 949–952
- Widarjono.A., 2007.*Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*.FE UII.Yogyakarta.
- Widodo. A. Waridin dan Maria. K.J., 2011.“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah”.*Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1*. Universitas Diponegoro. Semarang (dipublikasikan).